

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Untuk kelancaran tugas-tugas pengawasan tersebut diperlukan dukungan teknis, administrasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan secara fungsional oleh Inspektorat I.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian tersebut menyatakan bahwa Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat I.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2020 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2020 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis resiko.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat I terdiri dari :

1. Subbagian Program dan Tata Usaha

Subbagian Program dan Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat I.

Subbagian Program dan Tata Usaha secara fungsional dan administrasi bertanggung jawab kepada Inspektur I.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat I Kementerian Perindustrian sebagai berikut:



BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat I adalah **Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I**, dengan kegiatan kerja pada Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1. Program/Kegiatan Pengawasan Inspektorat I Tahun 2020

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TARGET | KET |
|----|---|------------|-----|
| 1. | Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I | 7 Laporan | |
| 2. | Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat I | 60 Laporan | |
| 3. | Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I | 2 Laporan | |
| 4. | Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I | 1 Laporan | |
| 5. | Layanan Audit Internal Inspektorat I | 1 Layanan | |

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut Inspektorat I pada tahun 2020 pada triwulan II mengalami revisi pemotongan anggaran yang disebabkan merebaknya pandemi virus corona secara nasional, yang semula anggaran sebesar Rp 3.400.000.000,- menjadi **Rp 1.715.273.000,-**. Terdapat 1 sub kegiatan yang tidak dilaksanakan

yaitu Monev Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan, sehingga alokasi anggaran dan volume kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2020

| KODE | Uraian Program / Kegiatan / Output / Jenis Belanja | VOLUME | JUMLAH (Rp,-) |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|
| 1841 | Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I | | 1.715.273.000 |
| 1841.001 | Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I | 7 Laporan | 202.300.000 |
| 1841.001.051 | Penyusunan Program Kerja dan Anggaran | 1 Laporan | 24.760.000 |
| A | Koordinasi Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat I | | 21.380.000 |
| B | Penyusunan Anggaran Inspektorat I Tahun 2021 | | 3.380.000 |
| 1841.001.052 | Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas | 5 Laporan | 6.760.000 |
| A | Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Lainnya | | 3.380.000 |
| B | Koordinasi dan Penyusunan LAKIP Inspektorat I | | 3.380.000 |
| 1841.001.053 | Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya | 1 Laporan | 170.780.000 |
| A | Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya Cakupan Tugas Inspektorat I | | 170.780.000 |
| 1841.002 | Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat I | 58 Laporan | 587.170.000 |
| 1841.002.051 | Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | | 586.170.000 |
| A | Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu | | 36.380.000 |
| B | Pelaksanaan Reviu Pengendalian Atas Pelaporan Keuangan (LK-BMN) | | 527.470.000 |

| | | | |
|-----------------|--|----------------------|--------------------|
| C | Pelaksanaan Reviu Pengendalian Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) | | 22.320.000 |
| 1841.002.052 | Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Cakupan Tugas Inspektorat I | 2 Laporan | 1.000.000 |
| A | Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu RKBMN | | 1.000.000 |
| 1841.003 | Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I | 1 Laporan | 3.000.000 |
| 1841.003.051 | Monev SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | | 3.000.000 |
| A | Koordinasi dan Pelaksanaan Penilaian Implementasi SAKIP | | 3.000.000 |
| 1841.004 | Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I | 1 Laporan | 65.838.000 |
| 1841.004.052 | Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi | | 65.838.000 |
| A | Koordinasi Pendampingan/Pengawasan Kegiatan Berisiko Tinggi dan Pembinaan Pengawasan Kinerja | | 3.000.000 |
| B | Pelaksanaan Pendampingan/Pengawasan Kegiatan Berisiko Tinggi (Pekerjaan Konstruksi Gedung Pendidikan, Mesin/Peralatan Pendidikan dan Pembinaan Tenaga Kerja/Tenaga Pendidik) | | 17.190.000 |
| C | Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Kinerja oleh Pimpinan | | 38.888.000 |
| D | Koordinasi dan Pelaksanaan Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko | | 6.760.000 |
| 1841.965 | Layanan Audit Internal | 1 Layanan | 856.965.000 |
| 1841.965.052 | Pelaksanaan Audit Internal | | 837.209.000 |
| A | Koordinasi Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri | | 21.730.000 |
| B | Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri | | 815.479.000 |
| 1841.003.053 | Pelaksanaan Audit Khusus | | 3.740.000 |
| A | Koordinasi dan Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu | | 3.740.000 |

| | | | |
|--------------|--|--|-----------|
| 1841.003.054 | Tindak Lanjut Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP | | 8.516.000 |
| A | Koordinasi dan Pelaksanaan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit | | 8.516.000 |
| 1841.003.055 | Reviu Perencanaan Anggaran | | 7.500.000 |
| A | Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu RKAKL | | 7.500.000 |

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat I yang dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Jenis Indikator | Target |
|--|---|--|-----------------|--------|
| PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN | | | | |
| 1. | Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian | Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I | IKU | 2,8% |
| | | Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I | IKU | 5% |
| | | Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti | IK | 80% |
| | | Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I | IKU | 91% |
| 2. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Nilai maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat I | IKU | 3,6 |

| PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----|-----|
| 3. | Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif | Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan | IK | 75% |
| | | Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) | IK | 76% |
| PERSPEKTIF KELEMBAGAAN | | | | |
| 4. | Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien | Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT | IK | 70% |
| | | Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya | IK | 80% |

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. Hasil yang Telah Dicapai

Total anggaran Inspektorat I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.715.273.000,- terdiri dari:

Tabel 4. Anggaran Inspektorat I Tahun 2020

| No. | Kode | Uraian Program dan Kegiatan | Jumlah (Rp,-) |
|-----|-------------|---|----------------------|
| | 1841 | Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I | 1.715.273.000 |
| 1. | 1841.001 | Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I | 202.300.000 |
| 2. | 1841.002 | Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat I | 587.170.000 |
| 3. | 1841.003 | Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I | 3.000.000 |
| 4. | 1841.004 | Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I | 65.838.000 |
| 5. | 1841.965 | Layanan Audit Internal | 856.965.000 |

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sesuai aplikasi PP39 telah mencapai **22,58%** atau sebesar Rp.**767.720.000,-** dari target **21,73%**, sedangkan realisasi fisik sebesar **27,55%** dari target fisik sebesar **28,30%**.

Sesuai dengan aplikasi *e-Monitoring*, realisasi anggaran Inspektorat I pada Triwulan II telah mencapai **28,41%** atau sebesar Rp. **767.306.868,-** dari target **30,29%**.

Terdapat perbedaan realisasi anggaran pada aplikasi PP39 dengan aplikasi *e-Monitoring* yang disebabkan karena adanya **18 (delapan belas) SPTJB** yang belum diinput oleh Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal, karena SP2D belum terbit.

Sementara itu, realisasi fisik kegiatan Inspektorat I sesuai aplikasi *e-Monitoring* baru mencapai **27,55%** dari target sebesar **33,46%**. Hasil ini masih belum memenuhi target karena belum semua kegiatan yang ditargetkan dapat dilaksanakan pada Triwulan II dapat dilaksanakan, Penyebab utama yaitu pandemik wabah virus corona di seluruh Indonesia, sehingga terbit Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebab Penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah, yang berisi antara lain perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) sampai dengan tanggal 21 April 2020. Pada tanggal 5 Juni 2020, ASN telah diberlakukan bekerja di kantor, namun dengan kapasitas 50%, sehingga banyak kegiatan yang harus dijadwalkan kembali. Diharapkan pelaksanaan kegiatan ditargetkan dapat diselesaikan pada triwulan selanjutnya.

Realisasi fisik dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat I dapat dilihat pada Tabel 5. dan Tabel 6.

Tabel 5. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

| Jenis Kegiatan | | PAGU Anggaran | Triwulan Ini | | | s/d Triwulan Ini | | | Sisa Anggaran s/d Triwulan IV | | |
|----------------|---|----------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Fisik (%) | Keuangan (Rp,-) | % | Fisik (%) | Keuangan (Rp,-) | % | Fisik (%) | Keuangan (Rp,-) | % |
| 1 | Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I | 202.300.000 | 21,87 | 43.193.760 | 16,82 | 21,87 | 43.193.760 | 16,82 | 78,13 | 213.606.240 | 83,18 |
| 2 | Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | 587.170.000 | 79,27 | 559.213.155 | 80,26 | 79,27 | 559.213.155 | 80,26 | 20,73 | 137.538.845 | 19,74 |
| 3 | Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I | 3.000.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 534.100.000 | 100,00 |
| 4 | Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I | 65.838.000 | 3,85 | 17.020.556 | 2,67 | 3,85 | 17.020.556 | 2,67 | 96,15 | 620.453.444 | 97,33 |
| 5 | Layanan Audit Internal | 856.965.000 | 23,82 | 148.267.846 | 11,63 | 23,82 | 148.267.846 | 11,63 | 76,18 | 1.126.606.154 | 88,37 |
| Total | | 1.715.273.000 | 27,55 | 767.720.000 | 22,58 | 27,55 | 767.720.000 | 22,55 | 72,45 | 2.821.755.342 | 77,45 |

Tabel 6. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi e – Monitoring

| Jenis Kegiatan | | PAGU Anggaran | Triwulan I | | | Sisa Anggaran | |
|----------------|---|----------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | Fisik (%) | Keuangan (Rp,-) | % | Jumlah (Rp,-) | % |
| 1 | Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I | 202.300.000 | 21,87 | 43.188.900 | 16,82 | 213.611.100 | 83,18 |
| 2 | Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | 587.170.000 | 79,27 | 559.194.730 | 80,26 | 137.557.270 | 19,74 |
| 3 | Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I | 3.000.000 | - | 0 | 0 | 534.100.000 | 100,00 |
| 4 | Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I | 65.838.000 | 3,85 | 17.044.000 | 2,67 | 620.430.000 | 97,33 |
| 5 | Layanan Audit Internal | 856.965.000 | 23,82 | 148.306.238 | 11,63 | 1.126.567.762 | 88,37 |
| Total | | 1.715.273.000 | 27,55 | 767.306.868 | 28,41 | 2.632.266.132 | 71,59 |

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan yaitu:

Tabel 6. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Jenis Indikator | Target | Realisasi | Keterangan |
|--|---|--|-----------------|--------|--------------------|--|
| PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN | | | | | | |
| 1. | Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian | Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I | IKU | 2,8% | Belum dapat diukur | BPK belum selesai melakukan pemeriksaan |
| | | Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I | IKU | 5% | Belum dapat diukur | Pelaksanaan Triwulan III |
| | | Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti | IK | 80% | Belum dapat diukur | Pelaksanaan Triwulan II |
| | | Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I | IKU | 91% | Belum dapat diukur | Pelaksanaan Triwulan II |
| 2. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Nilai maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat I | IKU | 3,6 | Belum dapat diukur | Pelaksanaan Triwulan II |
| PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL | | | | | | |
| 3. | Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif | Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan | IK | 75% | 15,30% | Satker yang diaudit telah memenuhi standar |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--|----|-----|--------------------|--|
| | | Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) | IK | 76% | Belum dapat diukur | Koordinasi dengan Set.Itjen |
| PERSPEKTIF KELEMBAGAAN | | | | | | |
| 4. | Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien | Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT | IK | 70% | 25% | Reviu LKMBN, Reviu PIPK, Audit Pusat (Set.Itjen) dan Audit Vertikal 8 Satker |
| | | Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya | IK | 80% | 25% | Reviu dan Audit Pusat (Set.Itjen) dan Audit Vertikal 8 Satker |

Sesuai data di atas, capaian kinerja untuk sasaran **Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian** sebagai berikut:

1. Indikator kinerja; Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inpektorat I
Indikator ini belum dapat diukur karena sampai dengan Triwulan I BPK belum selesai melakukan pemeriksaan terhadap laporan Keuangan Kementerian Perindustrian. Hasil indikator ini dapat dilihat pada Triwulan II.
2. Indikator kinerja; Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I
Pada indikator kinerja ini, Indikator ini belum dapat diukur, pelaksanaan direncanakan pada triwulan III.
3. Indikator kinerja; Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti
Indikator ini belum dapat diukur, pelaksanaan direncanakan pada triwulan II dan III.

4. Indikator kinerja; Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I
Indikator ini belum dapat diukur, pelaksanaan direncanakan pada triwulan III.

Capaian kinerja untuk sasaran **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik** sebagai berikut:

1. Indikator kinerja; Nilai SPIP satker cakupan tugas Inspektorat I
Indikator ini belum dapat diukur, pelaksanaan direncanakan pada triwulan II.

Capaian kinerja untuk sasaran **Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif** sebagai berikut:

1. Indikator kinerja; Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan
Pada Triwulan I, pelaksanaan audit dilakukan pada 1 (satu) satker Pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan 8 satker vertikal yaitu Poltek STTT Bandung, Poltek AKA Bogor, SMK-SMAK Bogor, BDI Jakarta, BDI Makassar, Poltek AI Makassar, SMK-SMAK Makassar, SMK-SMTI Makassar. Pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar, capaian indikator ini sebanyak 15,30%, karena masih ada audit yang dilakukan pada triwulan berikutnya..
2. Indikator kinerja; Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)
Indikator ini belum dapat diukur, kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, sedangkan Inspektorat hanya berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Capaian kinerja untuk sasaran **Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien** sebagai berikut:

1. Indikator kinerja; Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT

Pada Triwulan I, sesuai PKPT kegiatan yang dilaksanakan yaitu a) Audit kinerja; Pusat (Sekjen) dan 8 satker vertikal yaitu Poltek STTT Bandung, Poltek AKA Bogor, SMK-SMAK Bogor, BDI Jakarta, BDI Makassar, Poltek AI Makassar, SMK-SMAK Makassar, SMK-SMTI Makassar, b) Reviu PIPK ; satker Pusat (Sekjen dan BPSDMI) dan 3 satker vertikal yaitu Poltek STMI Jakarta, Poltek APP Jakarta dan BDI Jakarta}, c) Reviu LKBMN; 2 Satker Pusat dan 29 satker vertikal yaitu 13 Vokasi ,9 SMK dan 7 BDI cakupan tugas Inspektorat I Capaian indikator kinerja sebanyak.25 %, dan dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

2. Indikator kinerja; Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Pada indikator kinerja ini, kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan Reviu PIPK dan LKBMN dan Audit kinerja dengan penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya oleh dengan capaian kinerja sebanyak 25%, kegiatan masih berlanjut pada triwulan berikutnya.

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I, terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan ke satker vertikal mengalami penundaan, karena adanya wabah corona virus secara pandemik ke seluruh Indonesia.
2. Sampai saat terakhir laporan ini dibuat, masih terdapat 18 (delapan belas) SPTJB yang belum diinput Nomor dan Tanggal oleh bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal karena SP2D belum terbit.

D. Langkah Tindak Lanjut

Langkah tindak lanjut atas hambatan dan kendala yang dihadapi pada triwulan II untuk meningkatkan kinerja Inspektorat I adalah melalui peningkatan kerjasama yang sinergis antara lain :

1. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk segera menginput SP2D sehingga realisasi anggaran di PP39 sesuai dengan realiasi anggaran sesungguhnya.
2. Perlu meningkatkan koordinasi internal dalam pelaksanaan kegiatan agar terlaksana sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan pada awal tahun.
3. Perlu penjadwalan dan penganggaran kembali setelah situasi kondusif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan II Tahun 2020 telah berjalan baik sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2020, realisasi anggaran Inspektorat I berdasarkan aplikasi PP39 sebesar **22,58%** atau senilai Rp. **767.720.000,-** dari target **21,73%**, sementara realisasi fisik kegiatan Inspektorat I masih mencapai **27,55%** dari target sebesar **28,30%**. Realisasi anggaran Inspektorat I berdasarkan aplikasi *e-Monitoring* sebesar **28,41%** atau senilai Rp. **767.306.868,-** dari target **30,29%**,

Diharapkan pada Triwulan mendatang penyerapan anggaran dan kinerja fisik dapat ditingkatkan lebih baik, sehingga memberikan dampak yang positif untuk *stakeholder* di lingkungan Inspektorat I.

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi, namun dapat diselesaikan dengan baik. Upaya terhadap tingkat capaian, baik realisasi fisik maupun keuangan selalu dioptimalkan dengan mengacu kepada target yang telah ditetapkan.

B. Saran

Kerjasama dan koordinasi sinergi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat I baik internal maupun eksternal perlu lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik oleh Inspektorat I.

Demikian Laporan Inspektorat I periode Triwulan II Tahun 2020 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN – II TAHUN ANGGARAN 2020
INSPEKTORAT I